



Funded by the
European Union



International
Labour
Organization



United Nations
Office on Drugs and Crime



© ILO

► Sekilas



Mitra

- Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, POLRI; Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia; Serikat Buruh Bumi Manusia (SEBUMI- Federasi Pekerja Migran dan Informal Indonesia)- Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia—Koalisi Perempuan Indonesia; Solidaritas Perempuan, Women Crisis Center Mawar Balqis, Jaringan Buruh Migran dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).



Jangka Waktu

Januari 2024 – Desember 2026



Target penerima manfaat

Perempuan pekerja migran, anak, dan kelompok berisiko dalam konteks perdagangan dan penyelundupan manusia.



Fokus Geografi

- Regional, nasional dan sub-nasional (Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara) dengan fokus pada migrasi ke Malaysia.



Tujuan

- Meningkatkan hukum dan kebijakan yang melindungi pekerja migran, anak-anak dan kelompok rentan lainnya;
- Meningkatkan mekanisme pencegahan dan perlindungan di tingkat nasional dan regional; dan
- Meningkatkan akses terhadap informasi, layanan sosial dan hukum, konseling dan asosiasi untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi.

► Konteks dan Latar Belakang

Indonesia masih menjadi negara asal utama para pekerja migran. Setengah dari jumlah penempatan formal adalah perempuan, dengan proporsi signifikan ke Malaysia, Singapura, Hong Kong dan Taiwan sebagai pekerja rumah tangga dan perawat.

Memastikan perekrutan yang adil masih tetap menjadi tantangan. Meskipun Indonesia telah mengeluarkan aturan yang melarang pembebanan biaya kepada pekerja migran Indonesia dan berupaya menuju implementasi yang lebih kuat, perempuan masih menghadapi oknum calo dan broker yang jahat, informasi yang tidak berimbang, penipuan lowongan kerja, biaya perekrutan maupun biaya lain yang menjerumuskan mereka dalam jeratan utang.

Respon dari tindakan perlindungan dan penegakan hukum juga berkejaran dengan pola-pola eksploitasi baru. Penipuan dan perdagangan manusia yang dimungkinkan dengan cara-cara melalui dunia maya di seluruh kawasan menjebak para pekerja migran Indonesia, sementara garda terdepan perlindungan membutuhkan dukungan dalam menerapkan pendekatan berbasis penyintas dan penanganan kasus lintas batas negara. Investasi berkelanjutan dalam identifikasi korban, kerjasama bilateral dan jalur penanganan aduan yang aman tetap menjadi hal



Indonesia telah mengeluarkan aturan yang melarang pembebanan biaya kepada pekerja migran Indonesia dan berupaya menuju implementasi yang lebih kuat, perempuan masih menghadapi oknum calo dan broker yang jahat, informasi yang tidak berimbang, penipuan lowongan kerja, biaya perekrutan maupun biaya lain yang menjerumuskan mereka dalam lilitan utang.

penting bagi para perempuan pekerja migran dalam mendapatkan pemulihan.

Dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa, Program PROTECT bekerja di Kamboja, Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk menjaga hak para pekerja migran perempuan dan anak-anak dengan menitikberatkan pada migrasi perempuan Indonesia ke Malaysia.

Meningkatkan hukum dan kebijakan

Melalui kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2PMI/KP2PMI) Republik Indonesia, Jaringan Buruh Migran dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) PROTECT telah membantu menerapkan prinsip-prinsip responsif gender dan perekrutan yang adil ke dalam kebijakan dan praktik nasional. Tiga alat kebijakan utama dikembangkan:

- Daftar Periksa Uji Tuntas Perekrutan yang Adil untuk Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang mendorong terwujudnya praktik perekrutan yang adil dan transparan
- Panduan dan Daftar Periksa untuk Pengawas Ketenagakerjaan pada penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia
- Pedoman Pelaksanaan Orientasi / Edukasi Pra Pendaftaran memastikan pekerja migran menerima informasi resmi, tepat dan akurat dalam pembuatan keputusan dan persiapan untuk bekerja ke luar negeri.



@ILO

Langkah-langkah ini memperkuat pengawasan, transparansi dan pelindungan pekerja di seluruh tahapan migrasi yaitu: sebelum, selama dan sesudah bekerja.

Antara bulan Maret dan Juni 2025, Badan Legislatif dari Parlemen secara formal mengundang ILO untuk memaparkan standar perburuhan internasional dalam sidang dengar pendapat mengenai amendemen UU No. 18/2017 mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Evaluasi partisipatif tripartit dengan 104 peserta (setengahnya perempuan) menghasilkan rekomendasi konkrit, kini telah diserahkan ke DPR memastikan inklusivitas dan keselarasan dengan standar global.

Melalui kemitraan multi pemangku kepentingan PROTECT menyelenggarakan lokakarya nasional mengenai pengawasan ketenagakerjaan yang responsif gender, dengan mengundang 170 orang peserta untuk menguatkan sistem pengawasan melindungi pekerja migran.

Akhirnya, dengan dukungan dari Biro Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan Laporan Indikator Biaya Perekrutan (SDG 10.7.1) pada Hari Migran Internasional 2024, PROTECT membantu memastikan masa depan kebijakan migrasi dipandu oleh data dan bukti yang dapat diandalkan.

@ILO





Memperkuat Sistem dan Kelembagaan

Untuk menjadikan praktik migrasi yang adil dan aman, PROTECT telah mengembangkan kapasitas ratusan orang pejabat pemerintah, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, Lembaga Pelatihan Swasta, organisasi pekerja dan CSOs.

Pada tahun 2024, 542 orang petugas pengantar kerja (57% diantaranya perempuan) dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) menerima pelatihan dalam memberikan layanan bagi pekerja migran yang akan diberangkatkan—memberikan informasi dan panduan terverifikasi bagi pencari kerja melalui serial webinar nasional.

Bersama dengan BP2MI dan Internasional Organization for Migration (IOM), Protec membantu Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) melembagakan standar perekrutan adil melalui pengembangan sistem akreditasi/rating berbasis web untuk perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI). Instrumen dan panduan sistem itu diuji melalui konsultasi nasional dengan 98 perwakilan tripartit dan pelatihan bagi 112 petugas verifikasi (setengahnya perempuan) yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap badan-badan perekrutan.

Pelatihan pelengkap mengenai perencanaan kepatuhan strategis untuk 60 orang pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah memperkuat pemantauan terhadap pelaksanaan perekrutan oleh perekrut di tingkat nasional. Lebih dari 300 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) kini telah menandatangani 'Pakta Integritas' berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip perekrutan yang adil.

Kapasitas penegakan hukum juga telah mengalami perbaikan: kepolisian, petugas imigrasi dan jaksa penuntut umum menerima pelatihan mengenai

investigasi tindak perdagangan orang dan analisis bukti digital. Dengan dukungan dari UNODC 28 orang petugas dari Direktorat TPPPO dan Kejahatan Siber POLRI menerima pelatihan intensif mengenai keamanan siber, intelejen sumber terbuka (*open-source intelligence* (OSINT), *cryptocurrencies*, dan penyelidikan darknet. Pelatihan ini memperkuat kemampuan mereka dalam mendeteksi, menyelidiki, dan mendisrupsi TPPPO dan jejaring penyeludupan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan maya. UNODC juga memberikan bantuan teknis untuk badan imigrasi dan penegakan hukum lain dalam mencegah dan merespon TPPPO dan Penyeludupan Migran (PM), sembari meningkatkan kerjasama antar lembaga.

Pada bulan Oktober dan November 2025, UNODC mengimplementasikan lokakarya dalam Merespon Penyeludupan Migran melalui Laut dan Forum Pemuda Nasional di bulan November 2025 untuk meningkatkan pemahaman kaum muda dan calon migran mengenai risiko TPPPO dan eksploitasi daring.





Protect membantu melembagakan standar perekrutan adil melalui pembangunan sistem akreditasi atau rating berbasis web untuk perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).

Memperluas Akses untuk Layanan dan Dukungan

Untuk memastikan perlindungan menjangkau mereka yang paling membutuhkan, PROTECT mendirikan Migrant Worker Resource Center (MRC) di Cirebon, Lampung Timur, Kupang, Tulungagung, dan Deli Serdang. Dijalankan oleh federasi serikat pekerja dan organisasi perempuan, pusat informasi ini memberikan layanan konseling, penanganan kasus dan mekanisme koordinasi dan rujukan dengan otoritas setempat bagi calon pekerja migran dan pekerja migran yang pulang.

Di tingkat komunitas, PROTECT membantu 45 desa mengintegrasikan layanan migrasi aman ke dalam tata kelola lokal, melatih pejabat desa setempat dalam mencegah TPPPO, kekerasan, dan pelecehan terhadap pekerja perempuan dan keluarga mereka.

Pada bulan September 2025, PROTECT bersama-sama dengan BP2MI, Dinas Ketenagakerjaan Cirebon dan Saver Global merintis keamanan siber finansial dan pelatihan keamanan digital untuk 104 peserta di dua lokasi di Cirebon. Pelatihan diampu oleh para pejabat dinas dan mitra MRC, pelatihan ini melengkapi peserta dengan alat praktis dalam melindungi diri mereka dari penipuan dan eksploitasi daring.



► Informasi Narahubung:

► ILO:

Sophia Kagan, Kepala Penasihat Teknis, Kantor Regional ILO untuk Asia dan Pasifik; kagan@ilo.org

Sinthia Harkrisnowo, Koordinator Program Indonesia, ILO Indonesia and Timor Leste; sinthia@ilo.org

► UNODC:

Raden Andrean Sangabie Sancaya, Koordinator Program Indonesia, Human Trafficking and Migrant Smuggling Kantor UNODC Indonesia; raden.sancaya@un.org

Perlindungan Hak Perempuan dan Anak pada Migrasi Kerja (PROTECT INDONESIA)



© International Labour Organization 2025

► Contact:

**International Labour Organization
Jakarta Office**
Menara Thamrin Level 22
Jl. M. H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250
Indonesia
T: +62 (21) 391 3112
E: jakarta@ilo.org



ILO.ORG



ILOAsiaPacific



ILOAsiaPacific



ILOTV



Iloinfo



@iloinfo